

ABSTRAK

PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (STUDI KASUS DI KAWASAN *CAR FREE DAY* TAMAN KOTA BATURAJA)

**RYIDOH ALHAR
NPM : 2452001P**

Car free day yang seharusnya menjadi ruang untuk melakukan kegiatan sosial, budaya, serta olahraga, juga dimanfaatkan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk menggelar dagangan. Jumlah PKL yang berjualan di kawasan CFD terus bertambah. Sebagai institusi penegak Perda, Satpol PP sering kali menghadapi problematika yang menyebabkan pedagang tetap kembali berjualan.

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 21 September sampai tanggal 12 Oktober 2025 dengan menggunakan Metode Kualitatif Deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan dari Satpol PP, Dinas Perkim, Disperindag, pedagang, dan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara Satpol PP, Dinas Perkim dan Disperindag belum berjalan optimal, sumber daya tempat relokasi juga belum tersedia, sikap pelaksana belum dijalankan dikarenakan dinas perkim dan disperindag tidak pernah turun langsung, dan dalam struktur birokrasi belum ada SOP khusus yang mengatur pembagian tugas antara Satpol PP, Dinas Perkim dan Dinas Perdagangan.

Agar terciptanya ketertiban dan kenyamanan di kawasan *car free day* taman kota Baturaja, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut: penguatan komunikasi antara Satpol PP, Dinas Perkim dan Disdag, menyediakan lokasi relokasi yang layak, Satpol PP perlu membuat permintaan resmi sebelum melakukan penertiban, dan Pemerintah Daerah perlu menyusun SOP yang mengatur pembagian tugas dalam penataan PKL di kawasan *car free day* taman kota Baturaja.

Kata kunci : Implementasi kebijakan, Penertiban pedagang kaki lima, Polisi Pamong Praja, *Car Free Day*

ABSTRACT

THE PROBLEMS IN THE IMPLEMENTATION OF STREET VENDOR CONTROL POLICY BY THE CIVIL SERVICE POLICE UNIT (A CASE STUDY IN THE CAR FREE DAY AREA OF URBAN PARK BATURAJA)

RYIDOH ALHAR

NPM: 2452001P

Car Free Day, which is intended to serve as a space for social, cultural, and recreational activities, has also been utilized by street vendors (PKL) to sell their goods. The number of street vendors operating in the Car Free Day (CFD) area continues to increase. As an institution responsible for enforcing regional regulations, the Civil Service Police Unit (Satpol PP) often faces various challenges that cause vendors to repeatedly return to trading activities.

This study was conducted from September 21 to October 12, 2025, using a descriptive qualitative research method. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving informants from Satpol PP, the Housing and Settlement Office (Perkim), the Trade Office (Disperindag), street vendors, and the community.

The results of the study indicate that communication among Satpol PP, Perkim, and Disperindag has not been carried out optimally. In addition, relocation facilities for street vendors are not yet available. The implementers' disposition has not been fully exercised, as Perkim and Disperindag rarely participate directly in enforcement activities. Furthermore, within the bureaucratic structure, there is no specific Standard Operating Procedure (SOP) governing the division of duties among Satpol PP, Perkim, and the Trade Office.

To achieve order and comfort in the Car Free Day area of Baturaja City Park, several measures are required, including strengthening communication among Satpol PP, Perkim, and the Trade Office : providing appropriate relocation sites for street vendors; requiring Satpol PP to submit formal requests prior to enforcement actions; and encouraging the local government to establish SOPs that clearly regulate task distribution in managing street vendors within the Car Free Day area of Baturaja City Park.

Keywords: *Policy implementation, Street vendor regulation, Civil Service Police Unit, Car Free Day*